



RENSTRA

*RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029*

KECAMATAN SANGASANGA

JL. Jalan Mada RT.15 Kelurahan Sangasanga Dalam 75254

Email : sangasangakecamatan@gmail.com

website : sangasanga.kukarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sangasanga Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Sangasanga Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Kutai Kartanegara yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sangasanga Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Lingkup Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan untuk penyiapan program dan anggaran tahunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan Ridho Allah SWT, semoga dokumen Renstra ini dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam mencapai visi dan misi kedepannya.



Sangasanga, 23 Januari 2026

CAMAT SANGASANGA

M. DACHRIANSYAH, S.Sos, M. Si
NIP. 19680705 198803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan	48
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	49
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	51
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	51
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sangasanga Tahun 2025-2029	71
3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Sangasanga Tahun 2025-2029	76
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Sangasanga Tahun 2025-2029	79
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	81
4.2 Sub Kegiatan Prioritas	118
4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	118
BAB V PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Kecamatan Sangasanga	6
Tabel 2.2	Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangasanga	7
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Sangasanga Menurut Golongan Tahun 2025	27
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Kecamatan Sangasanga Menurut Kepangkatan Tahun 2025	27
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Kecamatan Sangasanga Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	28
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Kecamatan Sangasanga Yang Menduduki Jabatan Esselon Tahun 2025	29
Tabel 2.7	Data Aset Kecamatan Sangasanga Tahun 2025	30
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangasanga	36
Tabel 2.9	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sangasanga	44
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan Kecamatan	52
Tabel 2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Sangasanga	63
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	74
Tabel 3.2	Strategi Renstra Kecamatan Sangasanga Tahun 2025-2029 ..	76
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	78
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	79
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kecamatan Sangasanga	83
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	86
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sangasanga	97
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	118
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangasanga	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administratif Kecamatan Sangasanga	6
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kantor Camat Sangasanga	26
Gambar 2.3	17 Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	55
Gambar 3.1	Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	71
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	73
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Sangasanga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang mencakup berbagai potensi sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, dan kehutanan, serta keanekaragaman hayati yang tinggi, Sangasanga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Posisi geografisnya yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberikan peluang dan tantangan baru yang memerlukan perencanaan strategis untuk menghadapi dinamika pembangunan pada periode 2025-2029.

Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Sangasanga akan memasuki periode baru yaitu tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pasal 272 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025, menandai dimulainya Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, Kegiatan, dan Sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi: Persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sangasanga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sangasanga ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023- 2042;
 11. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 10 Tahun 2025 Tanggal 23 Desember 2025
 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan bidang Kecamatan Sangasanga dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sangasanga, yaitu: :

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Kecamatan Sangasanga.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang Kecamatan Sangasanga.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang Kecamatan Sangasanga untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sangasanga.
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang Kecamatan Sangasanga.

1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Sangasanga periode tahun 2025 s/d 2029 adalah sebagai berikut:

1. BAB 1 Pendahuluan

- Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah;
- Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum;
- Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. BAB 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas

secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah.

3. BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada :

- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

4. BAB 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya;
- Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030;
- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi;

5. BAB 5 Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

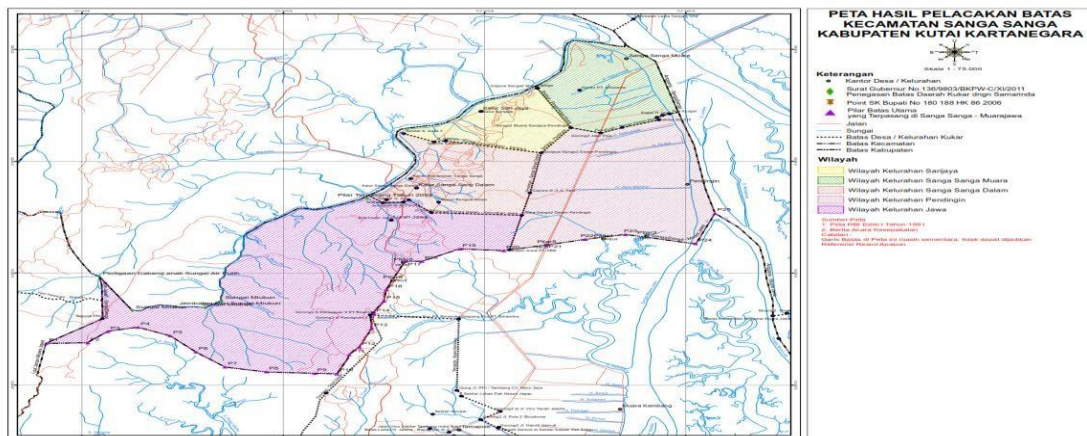
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SANGASANGA

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sangasanga merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Kecamatan Sangasanga memiliki luas wilayah mencapai 23.340 Ha / 233,40 Km² , Jumlah KK 6.041, Jumlah Penduduk 17.541 Jiwa yang dibagi dalam 5 kelurahan dengan Jumlah RT 66. Kecamatan Sangasanga merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1

Peta Kecamatan Sangasanga



Sumber : Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sangasanga

Secara geografis, Kecamatan Sanga- Sanga terletak antara 117°01'–117°17' Bujur Timur dan 0°35'–0°45' Lintang Selatan dengan luas wilayah 23.340 Ha / 233,40 Km², dapat di lihat pada Tabel. sebagai berikut :

Tabel 2.1

Batas Kecamatan Sangasanga

1.	Letak Antara	1170 01'BT - 1170 17'BT dan 00 35' LS - 00 45 LS								
2.	Batas	<table border="0"> <tr> <td>Sebelah Barat</td> <td>Kota Samarinda</td> </tr> <tr> <td>Sebelah Timur</td> <td>Kecamatan Anggana</td> </tr> <tr> <td>Sebelah Utara</td> <td>Kecamatan Anggana</td> </tr> <tr> <td>Sebelah Selatan</td> <td>Kecamatan Muara Jawa</td> </tr> </table>	Sebelah Barat	Kota Samarinda	Sebelah Timur	Kecamatan Anggana	Sebelah Utara	Kecamatan Anggana	Sebelah Selatan	Kecamatan Muara Jawa
Sebelah Barat	Kota Samarinda									
Sebelah Timur	Kecamatan Anggana									
Sebelah Utara	Kecamatan Anggana									
Sebelah Selatan	Kecamatan Muara Jawa									
3.	Luas Wilayah	10.591 Ha / 104,1 Km ²								

Sumber : Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sangasanga

Wilayah Kecamatan Sangasanga terdiri dari lima kelurahan, di antaranya: Kelurahan Jawa, Kelurahan Sangasanga Dalam, Kelurahan Pendingin, Kelurahan Sarijaya, dan Kelurahan Sangasanga Muara. Ibukota Kecamatan terletak di Kelurahan Sangasanga Dalam. Dari ke-5 kelurahan yang ada, Kelurahan Sangasanga Muara merupakan kelurahan yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan dengan jarak tempuh 10 kilometer, sedangkan Kelurahan Jawa merupakan kelurahan yang letaknya paling dekat dari ibukota kecamatan dengan jarak tempuh 3 kilometer

Di Kecamatan Sangasanga, sarana transportasi darat dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, menjadi satu-satunya pilihan sarana yang tepat yang dapat digunakan untuk menjangkau Kecamatan Sangasanga. Selain itu, di Kecamatan Sangasanga mengalir Sungai Sangasanga yang dapat dilalui menggunakan perahu, perahu motor, dsb. Adapun lebar sungai tersebut berkisar 150 meter dengan kedalaman hingga 20 meter. Adapun Luas Desa/Kelurahan dapat di lihat pada Tabel. sebagai berikut:

Tabel 2.2

Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangasanga

Kelurahan		Luas Wilayah	
		Ha	Km ²
1		2	3
1.	Jawa	4.713	40,8
2.	Sangasanga Dalam	1.248	15,3
3.	Pendingin Sarijaya	2.638	21,8
4.	Sangasanga Muara	794	12,5
5.		1.198	13,7
Jumlah		10.591 Ha	104,1 Km ²

Sumber : Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sangasanga

Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Sangasanga pada Bulan Desember tahun 2025 berjumlah 18.139 Jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 9.562 Jiwa dan perempuan berjumlah 8.577 Jiwa. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Sangasanga per 31 Desember 2025, dapat dilihat laporan bulanan penduduk sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAJ KARTAHEGAAA
KECAMATANSANGASANGA
 JL. Mada RT.15 Kel Sengas.anga Oalam Tetp (0\$C1) 4119181
 KALIMANTAN TIMUR 7525*1
 Umin: sangalano,luk.lrk1b.po.id E,mal: NnQIINnotUCMMManet,m.1l.com

L.APORAN BULANAH PENDUDUK KECAMATAH SAIOGASANG.4
 BULAN DESEMBER TAHUN 2025

NO	KELURAHAN	LUASWLAYAH		-UMLAH KK	PENOUOUK AWAL BULAN		PERU6AAH... .. PENOUOUK													PENDUDUK AKKIR BULAN		
							PEHAMBAHAH						PENGUIWIGAN									
							L.AHIR			DATAHO			KEIIATIAH			PINOAH						
							L	P	JUMLAK	L	P	L	P	JUla.AH	L	P	JUM	H			
1	SANGASAMIA DAI,M	1248	155	1503	3270	582	0	0	0	10	2	12	5	2	7	0	0	8	3271	2550	5821	
2	JAWA	4713	008	1102	1711	1789	0	0	0	5	0	9	0	0	0	0	0	0	1718	1793	3509	
•	SANGASANGA HILJARA	111		911	1835	1531	1	3		5	3	0	0	1	1	1	2	3	1810	1537	3177	
3	SARIJAYA	790	12.5	700	1091	978	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1093	en	2070	
5	PENOINCIN		137		1130	1838	1	1	1	8	1	1	1	1	2	0	1	1	1842	1720	3562	
	JUMUH	10611	10...	8'20	11513		3	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0				


 SANGASANGA, 02 JANUARI 2026
 KASI PEMERINTAHAN
 MULIADY SUGIANSYAH, S.Pd., MAP
 NIP. 19781005 200502 1 004

● ▾ 10 ● / 12 91162 1577

11139

Pusat pemerintahan Kecamatan Sangasanga terletak di Kelurahan Sangasanga Dalam yang mana merupakan pusat berbagai dinas/instansi tingkat kecamatan berada, seperti: Kantor Camat, UPT Huttanak, Koordinator P3R, UPT kantor pos dan giro, KUA, PLN, PDAM, Polsek, Danramil dan Puskesmas. Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di Wilayah Kecamatan Sangasanga terdiri dari Puskesmas Rawat Inap sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 5 (lima) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Sangasanga Terdapat Pasar tradisional sebanyak 1 pasar, Pasar - pasar musiman sebanyak 3 (tiga) pasar malam.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sangasanga diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan . Kecamatan adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di samping itu Camat juga berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Di samping itu pula Camat adalah merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.

- b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ketentuan/peraturan Perundangan-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan, dan;
- g. Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Dengan tugas masing-masing pejabat Kecamatan sebagai berikut:

1. Camat Mempunyai Tugas dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Fungsi Camat dalam Melaksanakan Tugas adalah Sebagai Berikut

- a. Menyenggarakan Urusan Pemerintah Umum.
 - b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentuan dan Ketertiban Umum.
 - d. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Layanan Umum.
 - f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan.
 - g. Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
 - i. Melaksanakan Tugas lain yang diperintah oleh Atasan.
2. Sekretaris Camat, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
 - a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.

- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretarian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan OPD, Pengembangan Inovasi OPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei Indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks nilai persepsi korupsi
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENTRA, RENJA, LKPJ, LPP, dan LKPD.
- h. Mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiun, daftar nominatif presentasi pegawai, sasaran kerja pegawai (SKP), daftar urutan kepangkatan(DUK), usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS?KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, penghargaan, pemberian sanksi dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa
 - k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat.
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
3. Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi barang milik daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD.
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim manajemen Perubahan OPD, Pengembangan Inovasi OPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks nilai persepsi korupsi.
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja.
 - g. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiun, daftar nominatif presentasi pegawai, sasaran kerja pegawai (SKP), daftar urutan kepangkatan(DUK), usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN dan

LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 - j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 - k. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
4. Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan, mengompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan, RENTRA, RENJA, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja LKJIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris.
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD.
 - e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan.
 - g. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan
 - h. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan.

- i. Merencanakan dan melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan Program dan Keuangan.
 - j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
5. Seksi Pemerintahan, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan.
 - d. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas pemerintah desa dan atau kelurahan.
 - e. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati
 - f. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan Desa dan keputusan Lurah yang disampaikan Kepada Bupati.
 - g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi Desa dan/atau Kelurahan.
 - h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintah desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan Kepala desa, Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga.
 - i. Merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antara desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan
 - j. Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
 - k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintah.

- l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan.
 - n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan, menginventarisasi, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/Kelurahan.
 - d. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
 - e. Merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - f. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA.
 - g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama.
 - h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - i. Merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan

sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan ketenteraman dan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat.
 - k. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan ketenteraman dan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat
 - l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketenteraman dan ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, izin mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
 - d. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi melaksanakan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita.
 - e. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.
 - f. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan, merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang
 - g. Merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air

- h. Merencanakan kegiatan menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan.
 - i. Merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan, untuk pengembangan sarana dan prasarana umum
 - j. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - k. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
8. Seksi Kesejahteraan Sosial, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan kesejahteraan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
 - d. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/1 (pencari kerja swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
 - e. Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi sosial, kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - f. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan.
 - g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial.

- h. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan.
 - i. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan.
 - j. Merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana/ prasarana peribadatan dan kehidupan beragama.
 - k. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial.
 - l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial.
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial, dan
 - n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
9. Seksi Pelayanan Umum, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan.
 - d. Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman.
 - e. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

- f. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman.
 - g. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
 - h. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan, dan keindahan lingkungan.
 - i. Merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.
 - j. Merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan.
 - k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum.
 - l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum.
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum, dan
 - n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
10. Lurah, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti, dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan sekretaris, pemerintahan, pembangunan dan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ, LPPD, ke badan perencanaan Pembangunan Daerah dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap akhir tahun.
 - d. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan serta memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan wanita dan gender serta pembinaan lembaga kemasyarakatan.

- e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan serta memfasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana layanan umum wilayah kelurahan.
 - f. Merencanakan kegiatan, melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kelurahan skala kecil sesuai pelimpahan kewenangan Bupati.
 - g. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi, mengumpulkan dan melaporkan data kegiatan keberadaan parpol.
 - h. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi pembuatan surat pengantar / surat keterangan dan perizinan dan pembinaan kelompok ekonomi kerakyatan.
 - i. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan serta memfasilitasi pemetaan dan pengawasan aset-aset pemerintah diwilayah kelurahan.
 - j. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan serta memfasilitasi pemetaan batas wilayah kelurahan dan pendataan warga miskin diwilayah kelurahan.
 - k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Lurah.
 - l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah.
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kelurahan.
 - n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
11. Sekretaris Lurah, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan kesekretarian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Kelurahan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
 - d. Merencanakan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan , keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Merencanakan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim manajemen Perubahan OPD, Pengembangan Inovasi OPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks nilai persepsi korupsi
 - f. merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P
 - g. Merencanakan pelaksanaan LKJIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENTRA, RENJA, LKPJ, LPP, dan LKPD.
 - h. Merencanakan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan.
 - i. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiun, daftar nominatif presentasi pegawai, sasaran kerja pegawai (SKP), daftar urutan kepangkatan(DUK), usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS?KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, penghargaan, pemberian sanksi dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Merencanakan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas.
 - k. Merencanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan.
 - l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
12. Seksi Pemerintahan Kelurahan, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi Kependudukan dan catatan sipil serta ketenagakerjaan.
 - d. Merencanakan kegiatan, dan menyiapkan bahan pendataan mengenai Angkatan Tenaga Kerja sebagai bahan pembinaan tenaga kerja
 - e. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas wilayah antara kelurahan dan penyelesaian pengaduan masalah pertanahan.
 - f. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintah.
 - g. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan
 - h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan.
 - i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
13. Seksi Pembangunan Kelurahan, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan.
 - d. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat.
 - e. Merencanakan kegiatan pelaksanaan pengumpulan dan pelaporan data kegiatan profil kelurahan, data kegiatan pembangunan kelurahan, data bidang pertanian, data penambangan sumber daya mineral dan energi, data sumber pencemaran lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan, usaha industri kecil, industri rumah tangga, sumber daya alam dan sumber daya manusia sektor industri.
 - f. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan dan pemantauan terhadap masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan air bersih, ketahanan pangan diwilayah kelurahan, pengembangan kelompok tani,

kelembagaan kelompok usaha ekonomi produktif, penghijauan rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air.

- g. Merencanakan kegiatan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan obyek wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.
 - h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penyampaian Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dan pengembangan Pelaksanaan Perkreditan Desa(LPD) serta memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah.
 - i. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional (SOP) Urusan Pembangunan.
 - j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah Urusan Pembangunan.
 - k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pembangunan.
 - l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Atasan.
14. Seksi Sosial Kelurahan, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
 - d. Merencanakan kegiatan, menyiapkan dan memfasilitasi organisasi sosial/ kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemberdayaan lembaga adat dan koordinasi Program Keluarga Berencana (KB), program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
 - e. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyusun data bantuan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan.
 - f. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan memfasilitasi koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gaji, kegiatan posyandu, pemberantasan wabah penyakit, imunisasi balita, anak sekolah dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan, penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial, serta sosialisasi kesejahteraan keluarga, peranan wanita, organisasi kewanitaan, pendidikan sekolah maupun luar sekolah, pendataan sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan kerukunan hidup beragama, pengadaan sarana/prasarana peribadatan dan kehidupan beragama.
 - h. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi pendataan bidang kemasyarakatan meliputi raskin, SWTM, bedah rumah, Jamkesda, Jamkesmas, SKTM, Proses administrasi surat pengantar pernikahan, cerai, rujuk dan bahan penyusunan kebijakan daerah.
 - i. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian Kinerja dan Standar organisasi kepemudaan dan Operasional Prosedur (SOP) Urusan Sosial.
 - j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial.
 - k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sosial.
 - l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
15. Jabatan Fungsional, Mempunyai tugas pemerintahan meliputi:
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku,
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga jenjang sesuai dengan keahlian.
 - b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat.
 - c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
 - d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Kecamatan.

Susunan Organisasi Kantor Camat berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelurahan, membawahi
 1. Sekretaris
 2. Seksi Pemerintahan
 3. Seksi Pembangunan
 4. Seksi Sosial
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Sangasanga Menurut Golongan
Tahun 2025

No.	Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	I		1	1
2	II	10	25	35
3	III	21	17	38
4	IV	5	2	7
	Jumlah	36	45	81

Sumber: Kecamatan Sangasanga, 2025

Pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 31 pria dan 22 wanita dengan dominasi pegawai di Golongan III sebanyak 36 orang.

b. Sumber Daya Manusia Kecamatan Sangasanga Menurut Kepangkatan

Data Pegawai Pada Kecamatan Sangasanga Berdasarkan Kepangkatan Kepegawaian Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Sangasanga Menurut Kepangkatan
Tahun 2025

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Pegawai ASN		Pegawai PPPK		Jumlah
			Pria	Wanita	Pria	Wanita	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
I	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	
	Juru Muda TK. I	I/b	-	-	-	-	
	Juru	I/c	-	-	-	-	
	Juru TK. I	I/d	-	1	-	-	1
II	Pengatur Muda	II/a	-	-	3	19	22
	Pengatur Muda TK. I	II/b	1	-	-	-	1
	Pengatur	II/c	1	1	1	-	3
	Pengatur TK. I	II/d	4	4	-	-	8
III	Penata Muda	III/a	1	4	4	4	11
	Penata Muda TK. I	III/b	2	4	-	-	6
	Penata	III/c	3	1	-	-	5

	Penata TK. I	III/d	10	5	-	-	15
IV	Pembina	IV/a	5	2	-	-	6
	Pembina TK. I	IV/b	1	-	-	-	1
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	
	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-	
	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	-	
	Total		28	22	8	23	81

Sumber: Kecamatan Sangasanga, Oktober 2025

c. Sumber Daya Manusia Kecamatan Sangasanga Menurut Tingkat Pendidikan

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan SLTA

Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel.2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Sangasanga
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

PENDIDIKAN	Pegawai				Jumlah
	ASN		PPPK		
	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan	
SD / SEDERAJAT	-	-	-	-	-
SMP / SEDERAJAT	-	1	-	-	1
SMA / SEDERAJAT	6	8	3	19	36
DIPLOMA I					
DIPLOMA II	-	-	-	-	-
DIPLOMA III	2	1	1	-	4
DIPLOMA IV	-	-	-	-	-
SARJANA (S1)	14	10	4	4	32
PROFESI	-	-	-	-	-
PASCA SARJANA (S2)	6	2			8
DOKTOR (S3)	-	-	-	-	-
Jumlah	28	22	8	23	81

Sumber: Kecamatan Sangasanga, Oktober 2025

Menurut tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah 36 orang dan Sarjana (S1) 32 Orang.

d. Sumber Daya Manusia Kecamatan Sangasanga yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon IV. Total Pegawai yang menduduki jabatan eselon adalah 29. Pegawai dengan jabatan eselon III berjumlah 2 orang, sementara jabatan eselon IV hanya diisi oleh 27 orang. Dan di Kecamatan Sangasanga terdapat 1 Jabatan Eselon yang belum terisi sampai dengan saat ini yaitu Jabatan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Lurah dan Kasi di Kelurahan.

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Kecamatan Sangasanga
Yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2025

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	II. a			
2	II. b			
3	III. a			
4	III. b	2		2
5	IV. a	6	3	9
6	IV. b	12	6	18
Jumlah		20	9	29

Sumber: Kecamatan Sangasanga, Oktober 2025

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain:

- Menunjang perkantoran; kegiatan ketatausahaan/ administrasi
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Dengan terus berkembangnya IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana dan Prasarana kerja Kecamatan

Sangasanga sudah memadai namun ada beberapa sarana dan prasarana yang belum menunjang pada bidang masing-masing. Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.7

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Sangasanga

NO	RUANGAN	PERLENGKAPAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Camat	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Kerja Pejabat	1 Buah
		Sofa	2 set
		Kursi Rapat	2 buah
		<i>Lemari Arsip</i> lainnya (Lemari Arsip)	1 Buah
		Televisi LCD	1 Buah
		Dispenser	1 Buah
		Kulkas	1 Buah
		AC	1 Buah
		Lemari Kaca Segi Empat	2 buah
		Gorden	12 lembar
		Mobil <i>Exspender</i>	1 Unit
2	Sekretaris Camat	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Kerja Pejabat	1 Buah
		Sofa	1 Set
		Kursi Rapat	12 Buah
		Kipas Angin	1 Buah
		AC	1 Buah
		Lemari Kaca Segi Empat	1 Buah
		Gorden	10 lembar
		Jam Elektronik/Jam Dinding	1 Buah
		Filing Kabinet	Aset lama
		Meja Rapat	1 Buah
		Mobil <i>Exspender</i>	1 Unit
3	Seksi Pemerintahan	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 buah

		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Lipat	2 buah
		PC Unit	4 Unit
		Printer	3 Buah
		Printer Cetak KTP	1 Buah
		AC	2 buah
		Kipas Angin	1 Buah
		Kursi Rapat	2 buah
		Motor	1 Buah
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Rapat	3 Buah
		Kursi Tamu di ruang Tunggu Pejabat Eselon II / Sofa	1 Set
		AC	1 Buah
		Lemari Arsip lainnya (Lemari Arsip)	1 Buah
		Filing Kabinet	1 Buah
		Printer	3 Buah
		Jam Dinding	1 Buah
		Gorden	6 lembar
		Laptop	2 Buah
		<i>Notebook</i>	1 Buah
		PC Unit	1 Buah
		Printer	1 Buah
		Kamera Elektronik	1 Buah
		Motor	1 Buah
5	Seksi Trantib	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Meja Kerja	2 Buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Lipat	3 buah
		Printer	2 Buah
		AC	1 Buah
		Gorden	6 lembar

		Laptop	2 Buah
		PC Unit	1 Buah
		Motor	1 Buah
		Kursi Putar/Kursi Kerja	1 Buah
6	Seksi Kesejahteraan Sosial	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 Buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Kerja	1 Buah
		Lemari Arsip lainnya (Lemari Arsip)	1 Buah
		Gorden	6 lembar
		AC	1 Buah
		Jam Dinding	1 Buah
		PC Unit	1 Unit
		Printer	1 Buah
		Filing Kabinet	1 Buah
		Motor	1 Buah
8	Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 buah
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2 buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 buah
		Lemari Arsip lainnya (Lemari Arsip)	2 Buah
		Kursi Lipat	2 Buah
		AC	2 Buah
		Jam Dinding	1 Buah
		Printer	4 Buah
		Gorden	5 lembar
		Laptop	4 Buah
		Notebook	1 Buah
		PC Unit	2 Unit
		Motor	1 Buah
9	Pelayanan Umum	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 buah

		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 buah
		Kursi Rapat	4 Buah
		Lemari Arsip lainnya (Lemari Arsip)	1 Buah
		Filing Kabinet	1 Buah
		Laptop	1 Buah
		PC Unit	1 Buah
		Printer	2 Buah
		AC	1 Buah
		Jam Dinding	1 Buah
		Gorden	6 lembar
		Mesin Ketik	1 Buah
		Kipas Angin	1 Buah
		Motor	1 Buah
10	Bagian Keuangan	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1 Buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Lemari Arsip lainnya (Lemari Arsip)	1 Buah
		Filing Kabinet	3 Buah
		Lemari Arsip	1 Buah
		Laptop	3 Buah
		Komputer PC	2 Buah
		Gorden	10 lembar
		Printer	4 Buah
		Kursi Rapat	2 Buah
		Meja Rapat	1 Buah
		Motor	1 Buah
11	Bendahara Pengeluaran	Filing Kabinet	1 Buah
		Lemari Arsip lainnya (Lemari Arsip)	1 Buah
		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah
		Meja Kerja	1 Buah
		Kursi Kerja	1 Buah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah

		Kursi Putar/Kursi Kerja Biru	1 Buah
		Gorden	9 lembar
		Laptop	1 Buah
		Printer	1 Buah
		Komputer PC	1 Buah
		Printer	1 Buah
		Motor	1 Buah
		Alat Penghancur Kertas	1 Buah
11	Gudang ATK	Kursi Kerja Putar	1 Buah
		Lemari Arsip lainnya (Lemari Arsip)	1 Buah
		<i>Proyektor + Attachment</i>	1 Buah
		<i>Overhead grane (Infocus)</i>	2 Buah
		<i>Microphone table stand</i>	3 Buah
		<i>Microphone</i>	2 Buah
		AC	1 Buah
		Jam Dinding	1 Buah
		Gorden	6 lembar
		Printer	1 Buah
		Soun Sistem	1 Buah
		Kompas	1 Buah
		Rak Besi/Metal	2 Buah
		<i>Wireles Amplifier</i>	1 Buah
12	Ruang Shalat	AC	1 Buah
		<i>Vacum Cleaner</i>	1 Buah
		Gorden	2 lembar
13	Ruang Rapat	Meja Rapat	8 buah
		Kursi Rapat	17 buah
		Kipas Angin	1 Buah
		AC	1 Buah
		Gorden	9 lembar
		Mikrofon	2 buah
		Soun Sistem	1 Set
14	Lobi	Kursi Rapat	5 Buah
		Jam Dinding	1 Buah
		Kursi Besi Metal/Kursi Tunggu	3 Buah
		Kursi Lipat	2 Buah
		Gorden	8 Lembar

		Televisi LCD	1 Buah
		Televisi	1 Buah
		Tabung Apar	7 Buah
		Kipas Angin	3 Buah

Sumber: Kecamatan Sangasanga, Juni 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sangasanga menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada Masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa, Kelurahan karena keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akun tabel.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pelayanan pada Kecamatan Sangasanga yang menggambarkan tugas fungsi Perangkat Daerah selaras dengan RPJMD. Capaian Kinerja Kecamatan Sangasanga berdasarkan tujuan, sasaran dan target rencana strategis Kecamatan Sangasanga pada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SANGASANGA

No.	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	70	75	80	85	69,05	0	62,67	62,67		106,23	0,00	83,56	90,98	
1	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	6	6	6	6		100	100	100	100	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	2	2	2	2	2	2	2		100	100	100	100	
2	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100	100	100	
3	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100	100	100	
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	12	12	12	12	12	12	12	12	12		100	100	100	100	

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
2	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akun tabel	14	14	14	14	14	14	14	14			100	100	100		
5	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	59	59	59	59	51	51	50			86,44	86,44	84,746		
6	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		
7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
3	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	56	56	56	56	56	56	56	56			100	100	100		
8	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
9	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	55	55	55	55	55	55	55	55			100	100	100		
4	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	-	-	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

10	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	-	-	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
5	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	10	10	10	10	10	10	10	10			100	100	100		
11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	25	25	25	25	25	25	25			100	100	100		
12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	60	60	60	60	60	55	59			100	91,667	98,333		
13	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
14	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		
15	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	1	1	1	1	0	1	1			#DIV/0!	100	100		
16	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78	78	78	78	78	78	222	245			100	285	314		
17	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	50	50	50	50	50	50	50			100	100	100		
6	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	0	25	25	25	25	0	25	25			#DIV/0!	100	100		
18	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	25	25	25	25	0	25	25			#DIV/0!	100	100		

7	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
19	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
20	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
8	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24	29	29	29	29	24	29	29			100	100	100		
22	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	6	6	6	6	6	6			100	100	100		
23	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	23	23	23	23	18	23	23			100	100	100		
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	60	70	80	90	100	40	50	60			66,67	71,43	75,00		
	Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
9	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		

24	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
10	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	4	4	4	4	4	4	4	4			100	100	100		
25	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100		
26	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	3	3	3	3	3	3	3			100	100	100		
3	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
11	Jumlah koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa yang dilaksanakan.	20	0	0	0	0	20	0	0			100	#DIV/0!	#DIV/0!		
27	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	0	0	0	0	3	0	0			100	#DIV/0!	#DIV/0!		
12	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang diikuti Desa / Kelurahan	169	669	669	669	669	169	669	669			100	100	100		
28	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	300	300	300	300	100	300	300			100	100	100		

29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3			100	100	100		
30	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66	366	366	366	366	66	366	366			100	100	100		
13	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	5	5	5	5	5	5	5	5			100	100	100		
31	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	161. 100	161. 100	161. 100	161. 100	161. 100	161. 100	161. 100	161. 100			100	100	100		
4	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	100	100	100	100	0	100	100			#DIV/0!	100	100		
14	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	1	1	1	1	0	1	1			#DIV/0!	100	100		
32	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	1	1	1	1	0	1	1			#DIV/0!	100	100		
5	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	100	100	100	100	0	100	100			#DIV/0!	100	100		

15	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0	4	4	4	4	0	4	4			#DIV/0!	100	100		
33	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	2	2	2	2	0	2	2			#DIV/0!	100	100		
34	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	1	1	1	1	0	1	1			#DIV/0!	100	100		
35	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	1	1	1	1	0	1	1			#DIV/0!	100	100		

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Sangasanga mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai dan untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan tidak terealisasi dikarenakan pemungutan retribusi yang ada di Kecamatan sudah dipindah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- merupakan hasil kerja sama Tim seluruh aparatur di lingkup Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Sangasanga menghadapi perubahan yang signifikan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Peningkatan kebutuhan infrastruktur, pertumbuhan populasi, serta tekanan pada sumber daya alam menjadi perhatian utama dalam penyusunan rencana strategis ini. Pendekatan yang holistik dan berbasis data diperlukan untuk menjamin pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

TABEL 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	7.01.1.03.0.00.17.0000 KECAMATAN SANGASANGA	28.191.6 07.852	63.314.0 37.709	50.527.0 57.387	54.275.3 04.460	32.927.5 94.754	27.523.9 86.673	61.376.2 51.300	48.505.5 07.784	50.507.6 50.898		97,63	96,94	96,00	93,06		18,12%	25,51%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.985.9 60.565	16.685.7 60.935	12.261.3 31.861	12.403.5 57.540	13.443.3 58.754	10.490.3 57.358	15.571.9 17.458	10.432.0 99.217	10.781.3 26.221		95,49	93,32	85,08	86,92		8,73%	3,86%
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.280. 000	350.000. 000	147.136. 402	227.358. 002	52.658.0 00	110.030. 950	323.825. 713	131.239. 700	166.351. 700		93,03	92,52	89,20	73,17		28,91%	33,71%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.808.96 7.237	7.504.22 9.510	9.586.85 9.142	10.090.8 06.961	11.908.2 26.754	7.432.11 6.390,0	6.600.42 2.787,0	8.007.87 1.975,0	8.977.56 9.855		95,17	87,96	83,53	88,97		11,78%	2,53%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.0 00	25.000.0 00	25.000.0 00	180.997. 300	37.450.0 00	24.810.0 00	24.770.0 00	24.445.0 00	104.424. 190		99,24	99,08	97,78	57,69		136,17%	-0,37%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	124.830. 000	25.000.0 00	-	-		124.460. 000	24.853.6 00	-		-	99,70	99,41			-44,99%	-20,01%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	615.411. 800	1.031.79 6.000	795.250. 416	569.184. 420	426.500. 000	603.861. 632	979.884. 827	762.429. 141	495.776. 702		98,12	94,97	95,87	87,10		-2,19%	10,02%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	364.176. 000	3.708.32 8.299	236.094. 000	274.457. 200	-	358.871. 139	3.669.70 4.922	230.540. 150	114.030. 400		98,54	98,96	97,65	41,55		185,22%	207,21%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.074.86 3.528	1.097.93 2.813	1.117.08 1.901	808.088. 657	929.284. 000	1.019.48 3.497	1.035.21 9.755	1.073.75 2.925	755.023. 692		94,85	94,29	96,12	93,43		-2,19%	1,32%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979.262. 000	2.843.64 4.313	328.910. 000	252.665. 000	89.240.0 00	941.183. 750	2.813.62 9.454	176.966. 726	168.149. 682		96,11	98,94	53,80	66,55		3,52%	26,31%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.829.09 4.320	36.709.8 74.000	29.951.1 85.000	29.623.0 83.560	7.903.69 6.000	9.795.89 7.580	36.315.6 47.946	29.877.6 80.241	28.483.8 58.311		99,66	98,93	99,75	96,15	-	45,16%	63,25%
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				199.024. 000	325.000. 000				133.260. 985					66,96		15,82%	0,00%
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.00 0	15.000.0 00	15.000.0 00	30.000.0 00	50.000.0 00	5.000.00 0	15.000.0 00	15.000.0 00	-		##### ##	##### ##	##### ##	-		91,67%	50,00%
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.824.09 4.320	36.694.8 74.000	29.936.1 85.000	29.394.0 59.560	7.528.69 6.000	9.790.89 7.580	36.300.6 47.946	29.862.6 80.241	28.350.5 97.326		99,66	98,93	99,75	96,45		44,73%	63,26%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.376.55 2.967	8.532.54 1.687	6.880.23 9.000	11.343.7 89.860	10.515.5 40.000	7.237.73 1.735	8.127.64 9.996	6.778.39 6.600	10.397.5 88.091		98,12	95,25	98,52	91,66		13,47%	-1,08%
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	647.855. 767	-	-	99.851.0 00	25.000.0 00	641.658. 050			24.009.0 00		99,04	-	-	-		-43,74%	-25,00%
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.798.43 7.200	5.447.88 4.687	3.487.83 9.000	4.408.35 1.980	1.025.00 0.000	3.705.82 6.265	5.164.97 3.996	3.486.90 0.100	3.715.60 8.608		97,56	94,81	99,97	84,29		-10,73%	1,72%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.930.26 0.000	3.084.65 7.000	3.392.40 0.000	6.835.58 6.880	9.465.54 0.000	2.890.24 7.420	2.962.67 6.000	3.291.49 6.500	6.657.97 0.483		98,63	96,05	97,03	97,40		38,80%	3,40%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	200.000. 000	50.000.0 00	102.233. 500	145.000. 000	-	190.812. 500	49.580.0 00	67.683.9 25		-	95,41	99,16	66,21		17,82%	-18,50%
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	200.000. 000	50.000.0 00	102.233. 500	145.000. 000	-	190.812. 500	49.580.0 00	67.683.9 25		-	95,41	99,16	66,21		17,82%	-18,50%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	1.185.86 1.087	1.384.30 1.526	802.640. 000	920.000. 000	-	1.170.22 3.400	1.367.75 1.726	777.194. 350		-	98,68	98,80	96,83		-2,67%	4,22%
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	1.185.86 1.087	1.384.30 1.526	802.640. 000	920.000. 000	-	1.170.22 3.400	1.367.75 1.726	777.194. 350		-	98,68	98,80	96,83		-2,67%	4,22%

Adapun Sumber keuangan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Sangasanga adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Tabel di atas menyajikan data anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan data realisasi berdasarkan pagu anggaran DPA, ada tiga program utama Kecamatan Sangasanga dari tahun 2021 hingga 2025. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik pada Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran di atas 95 %, dengan rasio pertumbuhan anggaran 46,16%, rasio pertumbuhan realisasi mencapai 63,25%.

Adapun sumber keuangan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Sangasanga adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Tabel di atas menyajikan data anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2022-2026 dan data realisasi berdasarkan pagu anggaran DPA, ada empat program utama Kecamatan Sangasanga dari tahun 2022 hingga 2025. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup baik, seluruh program dengan capaian rasio rata-rata di atas 95%.

Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2022 sampai dengan 2025 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 95%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Sangasanga sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- ✓ Penyusunan RKA DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target;
- ✓ Kerja sama tim pengelola anggaran yang memadai baik Pengguna Anggaran, Bendahara, PPTK maupun Pejabat

- ✓ Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Sangasanga.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran di beberapa sub kegiatan dan tidak bisa 100% seperti penyediaan jasa komunikasi dan Listrik, Belanja Gaji dan Tunjangan dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Dengan mengidentifikasi kelompok sasaran ini secara jelas, Kecamatan Sangasanga dapat merancang program dan kegiatan yang lebih spesifik, efektif, dan terukur dalam mencapai tujuan Renstra 2025-2029.

Kelompok Sasaran Utama Layanan Kecamatan Sangasanga:

1. Masyarakat Umum Sangasanga :

1. Ini adalah kelompok sasaran paling luas, meliputi seluruh penduduk Kecamatan Sangasanga, baik individu maupun keluarga, yang membutuhkan layanan administrasi dasar (KTP, KK, Akta Kelahiran/Kematian), pelayanan perizinan sederhana, atau informasi publik.
2. Fokus: Peningkatan kepuasan, kecepatan, dan kemudahan akses layanan

2. Pelaku Usaha (UMKM) :

1. Meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di wilayah Sangasanga, termasuk pedagang, pengrajin, penyedia jasa, dan sektor informal.
2. Fokus: Pembinaan, fasilitasi perizinan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta akses ke pasar dan permodalan.

3. Kelompok Rentan dan Distabilitas:

1. Mencakup lansia, penyandang distabilitas, ibu hamil, anak-anak, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas lainnya yang mungkin memiliki hambatan dalam mengakses layanan atau membutuhkan perhatian khusus.
2. Fokus: Penyediaan fasilitas yang akses bel, layanan prioritas, program bantuan sosial, dan perlindungan.

4. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan :

1. Seluruh staf dan pejabat yang bertugas di kantor Kecamatan Sangasanga.
2. Fokus: Peningkatan kompetensi, profesionalisme, kesejahteraan, dan motivasi kerja untuk mendukung pelayanan prima.

5. Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan :
 1. Meliputi kepala desa/lurah, perangkat desa/kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, RT, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
 2. Fokus: Peningkatan koordinasi, sinergi program pembangunan, dan pemberdayaan dalam pelaksanaan fungsi masing-masing.
6. Kelompok Sadar Lingkungan dan Komunitas Peduli Lingkungan :
 1. Masyarakat atau kelompok yang memiliki inisiatif dalam pengelolaan sampah, penghijauan, mitigasi bencana, atau pelestarian lingkungan.
 2. Fokus: Pemberdayaan, fasilitasi program, dan dukungan dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan kecamatan.
7. Institusi Pendidikan dan Kepemudaan:
 1. Sekolah, dan organisasi kepemudaan di Sangasanga.
 2. Fokus: Kolaborasi dalam program edukasi lingkungan, pengembangan potensi pemuda, dan peningkatan kapasitas SDM.

2.1.5 Mitra Kecamatan Sangasanga

Dalam pemberian layanan di Kecamatan Sangasanga, Camat dan jajarannya tidak bekerja sendiri. Mereka bermitra dan berkoordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, serta instansi vertikal dan lembaga lainnya. Kemitraan ini krusial untuk memastikan pelayanan yang komprehensif dan terpadu kepada masyarakat.

Berikut adalah beberapa mitra Perangkat Daerah dan instansi terkait yang penting dalam pemberian pelayanan di Kecamatan Sangasanga :

1. Kepolisian Sektor (Polsek) Sangasanga: Peran: Menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum. Kemitraan: Koordinasi dalam menjaga Kamtibmas, penanganan kasus kriminalitas, dan sosialisasi hukum.
2. Komando Rayon Militer (Koramil) Sangasanga: Peran: Mendukung stabilitas keamanan dan pertahanan. Kemitraan: Sering terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, dan membantu menjaga kondusif wilayah.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten: Peran: Koordinasi penanggulangan bencana. Kemitraan: Kecamatan

menjadi garda terdepan dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di wilayahnya, berkoordinasi langsung dengan BPBD untuk bantuan dan penanganan lebih lanjut.

4. Kantor Urusan Agama (KUA): Peran: Pelayanan keagamaan, termasuk pencatatan pernikahan. Kemitraan: Koordinasi dalam pembinaan kerukunan umat beragama dan layanan terkait pernikahan.
5. PT. PLN (Persero), PDAM, dan Perusahaan Penyedia Utilitas Lainnya: Peran: Menyediakan layanan dasar listrik dan air bersih. Kemitraan: Kecamatan memfasilitasi keluhan masyarakat terkait gangguan layanan utilitas dan berkoordinasi untuk program perluasan jaringan.
6. Bappeda, untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Sangasanga berjalan dengan baik dan terarah.
7. DPMD, untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa/Kelurahan dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa dan Kelurahan.
8. Disdukcapil, mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
9. Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan, meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK di Tingkat RT. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Sangasanga:
10. Inspektorat, untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta Evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap

peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dari Kecamatan.

11. Dinas Sosial, mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masyarakat Kecamatan Sangasanga sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Sangasanga adalah “Meningkatnya layanan administrasi Kecamatan” Pelayanan dapat dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Sangasanga yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sangasanga. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara Realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sangasanga maka dapat dirumuskan permasalahan di wilayah ini. Permasalahan kecamatan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) hal yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah yang terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10

Pemetaan Permasalahan Kecamatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya Pelayanan Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat	
		Masih minimnya infrastruktur yang mendukung dalam pelayanan publik khususnya berbasis digital	
		Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan	
		Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.	
		Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang belum merata	
		Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena mesin rusak	
		Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)
	Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.		
	Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.		
	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marginal (perempuan, anak, penyandang distabilitas, lansia,	Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait	Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait
			Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
			Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	<p>Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>Keterbatasan akses jalan menuju kantor kecamatan atau Kelurahan tertentu</p> <p>Belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk menuju kecamatan, hanya tersedia transportasi antar kota.</p> <p>Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis</p> <p>Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting.</p> <p>Kerusakan ekosistem akibat penambangan batu bara ilegal di sekitar Waduk Sangasanga</p>
	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	<p>Minimnya pelaksanaan forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral di tingkat kecamatan</p> <p>Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemda.</p> <p>Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.</p> <p>Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.</p>

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
		Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Sumber: hasil analisis, 2025

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional).

Sebelum perumusan isu strategis kecamatan, berikut ini dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, serta beberapa aspek lainnya.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan dimulai dengan merumuskan Visi, Misi, dan nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi ke depan agar dapat eksis, bersifat antisipatif, dan inovatif.

Adapun Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Misi merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh perangkat daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Sedangkan Misi yang diemban untuk mencapai Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai fondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih di atas selanjutnya dijabarkan dalam 17 Program Dedikasi yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:

Gambar 2.3

17 Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih



17 PROGRAM DEDIKASI

<p>Misi#1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;</p>	<p>Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia;</p> <p>Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa</p> <p>Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pasantren Idaman Terbaik</p> <p>Program Etam Sejahtera</p>
<p>Misi#3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.</p>	<p>Program Pelayanan Publik Cerdas</p> <p>Program ASN Kukar Terbaik</p>
<p>Misi#2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif</p>	<p>Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera</p> <p>Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh</p> <p>Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.</p> <p>Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.</p> <p>Program Stimulus Komunitas Kreatif</p>
<p>Misi#4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.</p>	<p>Program RT Ku-Terbaik</p> <p>Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.</p> <p>Program Jaga Lingkungan Lestari</p>
<p>Misi#5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.</p>	<p>Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.</p> <p>Program Internet Desa Gratis.</p> <p>Program Permukiman Idaman Terbaik.</p>

Implementasi setiap Misi dijabarkan dalam bentuk program, baik Program Prioritas maupun Program Dedikasi. Berdasarkan tugas dan fungsi, maka kecamatan Sangasanga mendukung dalam pencapaian Misi 3 dengan ke program dedikasi Pelayanan Publik Cerdas dan Misi 4 dalam Program dedikasi RT-ku Terbaik. Selain itu, kecamatan juga mendukung secara tidak langsung terhadap program-program dedikasi lainnya. Adapun penjelasan kedua program dedikasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Publik Cerdas

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *smart and good governance* hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan mini mall pelayanan publik cerdas pada setiap kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.

b. Program RT Ku-Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 Juta per RT, menjadi minimal 150 Juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan, prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program-program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab. Khusus untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban

umum, maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup diwilayah Kecamatan adalah Proses evaluasi dan analisis terhadap rencana tata ruang wilayah kecamatan, yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkelanjutan. Ini mencakup penilaian kesesuaian rencana dengan kondisi lingkungan, potensi dampak, serta upaya mitigasi dan pelestarian lingkungan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu:

- Kegiatan Pasca Tambang Belum Dilakukan dengan Baik
Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama tambang batu bara, meninggalkan banyak lahan dengan karakteristik pasca tambang yang merusak. Lubang besar, penurunan muka tanah, dan potensi longsor menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan lingkungan hidup. Proses reklamasi yang seharusnya menjadi kewajiban belum terlaksana optimal, menyebabkan gangguan ekologis jangka panjang serta memperparah kerusakan lahan dan menurunkan nilai produktivitas wilayah.
- Kerusakan Hutan Dan Lahan
Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tingkat kerusakan hutan dan perubahan lahan yang cukup tinggi. Penebangan liar, perambahan lahan, dan kegiatan pertambangan ilegal menjadi penyebab utama degradasi kawasan hutan yang luasnya mencapai lebih dari 83% dari total wilayah kabupaten. Dari kawasan ini, sekitar 52% merupakan hutan produksi yang semestinya dijaga keberlanjutannya. Namun, lemahnya

pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan ekosistem hutan rentan rusak dan kehilangan fungsi ekologis

- **Perubahan Lingkungan Sekitar Perairan Sungai**

Perubahan lingkungan juga terlihat nyata di wilayah perairan, pesisir. Ekosistem Mangrove di Delta Mahakam rusak parah, menyebabkan abrasi meningkat hingga 10 kali lipat dari biasanya. Intrusi air laut di DAS Mahakam memperburuk kualitas air minum masyarakat. Menurunnya vegetasi air, kualitas air yang tercemar, serta pendangkalan sungai telah mengganggu sistem hidrologi dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini diperparah oleh pembangunan permukiman dan konversi lahan yang tidak terkendali.

- **Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan menjadi isu krusial yang perlu segera diantisipasi. Banyak lahan pertanian produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralih menjadi kawasan tambang, industri, maupun permukiman tanpa perencanaan yang komprehensif. Hal ini mengancam ketahanan pangan daerah dan menurunkan daya dukung lingkungan. Ketiadaan regulasi spesifik di tingkat kabupaten mengenai pembatasan alih fungsi lahan memperburuk kondisi, dan menyebabkan konflik ruang serta ketidakseimbangan pembangunan wilayah.

3. Potensi Kecamatan Sangasanga

Kecamatan Sangasanga memiliki potensi yang sangat beragam dan strategis, diantaranya:

A. Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam:

Pertanian dan Perkebunan: Potensi besar sebagai lumbung pangan dengan komoditas seperti padi, nanas, sayuran, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, dan buah naga. Didukung keberadaan Waduk Sangasanga sebagai sumber irigasi vital dan adanya Kelompok Joglo Tani di Kelurahan Sanipah.

Perikanan dan Kelautan: Merupakan penghasil ikan laut terbesar di Kutai Kartanegara (sekitar 26% dari total produksi ikan laut Kukar) dan sentra budidaya rumput laut terbesar (sekitar 49% dari total produksi rumput laut Kukar), terutama di wilayah pesisir seperti Tanjung Harapan, Kuala Sangasanga, Teluk Pemedas, dan Muara Sembilang.

Peternakan: Potensi untuk sapi potong, ayam potong, ayam buras, dan kambing.

Kehutanan: Memiliki Kawasan dengan flora dan fauna, potensi wisata alam yang berada pada wisata Bekantan Sungai Hitam.

Pertambangan dan Industri: Keberadaan industri gas, minyak, batu bara, ternak potong, dan pengolahan limbah minyak.

Sektor Pariwisata: Destinasi alam menarik seperti Wisata Bekantan Sungai Hitam, Pantai Tanah Merah, Pantai Tanjung Harapan, Waduk Sangasanga, Kaltim Park, Pantai Teluk Pemedas, Pantai Sanipah, *Coconut Beach*, *Believe Beach* dan Wisata *Like View* Sangasanga.

- B. Memiliki Posisi Strategis, terletak di wilayah timur Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar. Kecamatan Sangasanga juga sebagai bagian dari daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) baru Indonesia, membuka peluang signifikan untuk pengembangan di sektor perkebunan, perekonomian, infrastruktur, dan layanan publik di masa depan.

4. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan Kecamatan

Beberapa isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu: Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN, Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).

5. Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

Beberapa isu lingkungan dinamis Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan Perangkat Daerah yaitu:

- Aspek Global: Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi, Perkembangan Teknologi yaitu untuk memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat. Isu lingkungan dinamis yang muncul antara lain

adalah adanya kesenjangan digital (digital divide), masalah keamanan data dan privasi, kebutuhan akan literasi digital Masyarakat.

- Aspek Nasional: Intinya adalah pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) dan modal manusia adalah adanya perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang mengancam ketersediaan sumber daya alam, memicu krisis sosial, dan menuntut adaptasi keterampilan baru yang selaras dengan ekonomi hijau dan digital, yang juga menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup dan dampak besar dari pembangunan IKN (misal: perubahan lahan, peningkatan sampah, tekanan penduduk) dan pengaruh kebijakan nasional terkait energi/lingkungan dan ketidakmerataan akses pendidikan dan keterampilan, keterbatasan SDM pengawas lingkungan, penurunan kualitas lingkungan akibat pembangunan industri, krisis sumber daya alam (air, pangan), serta kesenjangan akses antara perkotaan dan pedesaan yang menghambat peningkatan kualitas SDM.
- Aspek Regional: Intinya adalah Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN untuk Pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*): Mengintegrasikan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara efisien, Ekonomi Sirkuler dan Hijau yaitu untuk mendorong model bisnis yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya, serta mengembangkan industri hijau, Infrastruktur Berkelanjutan: Membangun infrastruktur yang tahan iklim dan ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi superhub, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor hijau dan memastikan lingkungan yang sehat untuk penduduk.
- Aspek Wilayah Kutai Kartanegara: Yaitu Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN: pada peningkatan infrastruktur (jalan, akses), pengembangan potensi investasi (hilirisasi industri, pariwisata, pertanian), serta percepatan pelayanan publik dan tata ruang untuk menarik investor dan menunjang kebutuhan IKN, Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal yaitu

akses setara terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta sarana air bersih dan sanitasi, Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas: melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengembangan keterampilan digital dan inovasi, penciptaan lingkungan kerja yang positif, peningkatan kesejahteraan, serta sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan.

6. Isu Strategis Perangkat Daerah (Kecamatan Sangasanga)
 - a. Dampak dan Peluang IKN: Meskipun masuk delineasi IKN, pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah pusat belum signifikan, sementara pengembangan SDM sudah mulai dilakukan. Ada ketidakjelasan peralihan tanggung jawab pembangunan dari Pemkab ke Pemerintah Pusat, sehingga pembiayaan dan pembangunan masih ditangani Pemkab Kukar. Hal ini menimbulkan tantangan koordinasi dan pemanfaatan peluang IKN secara optimal.
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*excellent service*) yang cepat, mudah, murah, efisien, dan transparan, serta berbasis elektronik.
 - c. Peningkatan Infrastruktur: Prioritas perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan yang masih sangat minim di beberapa wilayah.
 - d. Kemiskinan dan Stunting: Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu strategis yang membutuhkan program penanggulangan terkoordinasi dan efektif.
 - e. Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Kebutuhan untuk mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan akibat eksploitasi (terutama batu bara), dan memastikan kelestarian ekosistem.
 - f. Tata Kelola Pemerintahan: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis elektronik dan peningkatan kompetensi aparatur.

Berdasarkan pemaparan gambaran umum pelayanan, identifikasi permasalahan, serta analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis termasuk dimensi KLHS dan isu lingkungan dinamis pada skala global, nasional, dan regional—dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sangasanga memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Pemahaman menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan proyeksi isu ke depan ini menjadi landasan krusial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Sangasanga. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah menetapkan visi dan misi yang jelas, serta merancang program kerja yang adaptif dan solutif untuk mencapai pembangunan Kecamatan Sangasanga yang lebih maju dan berkelanjutan dalam periode 2025-2029. Adapun teknik penyimpulan Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.11

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Sangasanga

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Rendahnya Produktivitas	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN	Dampak dan Peluang IKN
Memiliki posisi yang strategis (dekat dengan IKN)	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat			Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

<p>Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam, antara lain Pertanian dan Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Industri</p>	<p>Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkunagn hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)</p>	<p>Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar</p>		<p>Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia</p>	<p>Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM</p>	<p>Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas</p>	<p>Peningkatan Layanan Infrastruktur</p>
<p>Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan</p>	<p>Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa</p>	<p>Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat</p>		<p>Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat</p>			<p>Kemiskinan dan Stunting</p>

Desa Mandiri sebagai Pilar Ketahanan Sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Ekosistem Pesisir sebagai “Karbon Biru” & Keanekaragaman Hayati Penguatan Regulasi Lingkungan Terbaru Lingkungan Terbaru		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan					Tata Kelola Pemerintahan
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)					
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		

Sumber: hasil analisis, 2025

Penjelasan masing-masing isu strategis Kecamatan Sangasanga dalam kurun waktu 2025 –2029, adalah sebagai berikut:

1. Integrasi dengan Pembangunan IKN Nusantara.

Dekatnya Kecamatan Sangasanga dengan IKN Nusantara membuka peluang besar untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan baru, Kecamatan Sangasanga diproyeksikan akan mengalami perkembangan pesat, baik dari segi infrastruktur maupun migrasi penduduk. Namun, peluang ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait tekanan terhadap lahan produktif, potensi konflik tata ruang, dan dampak sosial-ekonomi dari proses urbanisasi yang cepat.

Pemerintah Kecamatan Sangasanga harus segera menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan kebijakan pembangunan IKN Nusantara untuk menghindari konflik penggunaan lahan dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk pihak pemerintah pusat dan IKN, akan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan harmonis. Selain itu, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari IKN dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak sosial-ekonomi dari migrasi penduduk yang dipicu oleh pembangunan IKN, seperti peningkatan kebutuhan akan perumahan, fasilitas umum, dan lapangan pekerjaan.

2. Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sistem pelayanan publik di Kecamatan Sangasanga masih banyak yang dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan transparansi. Dalam era digitalisasi ini, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah kecamatan harus segera melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik dengan mengadakan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan aplikasi pelayanan publik sangat diperlukan. Aplikasi pelayanan publik ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, perizinan, pengelolaan data

penduduk, serta mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Meskipun Kecamatan Sangasanga memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, infrastruktur dasar di wilayah ini masih terbatas. Beberapa jalan penghubung antar desa dalam kondisi rusak, fasilitas pelayanan publik kurang memadai, dan akses internet yang terbatas menjadi masalah utama. Kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas pelayanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini dalam lima tahun mendatang, pemerintah kecamatan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi perbaikan jalan antar desa, peningkatan fasilitas kantor kecamatan dan kelurahan, serta perluasan jaringan internet untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah juga perlu melakukan perencanaan yang matang dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta sektor swasta untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan Kecamatan Sangasanga dapat menjadi kawasan yang lebih terhubung, efisien, dan siap menyambut tantangan pembangunan di masa depan.

4. Kemiskinan dan Stunting

Kemiskinan dan Stunting saling keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga yang buruk dengan kejadian stunting pada anak, yang memerlukan solusi komprehensif melalui peningkatan kualitas SDM, program ketahanan pangan, serta perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial untuk menciptakan generasi penerus yang sehat dan produktif. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah dapat menghambat kemampuan orang tua untuk menyediakan makanan bergizi seimbang bagi anak, termasuk pada ibu hamil masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, yang pada akhirnya menyebabkan stunting.

Dengan adanya pengembangan potensi kewilayahan, diharapkan Kecamatan Sangasanga bisa memanfaatkan peluang besar ini. Dapat mengurangi kemiskinan dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan melalui UMKM yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit masalah kemiskinan bisa

berkurang, seiring dengan berkurangnya kemiskinan maka masalah stunting pun bisa teratasi.

Selain mengembangkan perekonomian masyarakat, pihak kecamatan pun perlu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan keluarga, dalam gerakan percepatan penurunan stunting dan mencegah stunting. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan melalui posyandu, karena mengatasi kemiskinan dan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif, kegiatan yang bisa dilakukan seperti diversifikasi pangan yaitu mendorong pangan lokal yang beragam dan bergizi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan seperti beras, peningkatan akses layanan dasar dan meningkatkan peran perempuan serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran gizi, sanitasi dan kebersihan.

5. Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Kecamatan Sangasanga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, perkebunan, dan perikanan. Sektor ekonomi lokal di Kecamatan Sangasanga, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses ke modal, teknologi, dan pasar. Hal ini menghambat potensi sektor-sektor tersebut untuk berkembang lebih pesat.

Pemerintah kecamatan perlu mendorong investasi di sektor hilir, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program-program pelatihan berbasis kebutuhan lokal juga harus diadakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, memperkuat koperasi sebagai wadah untuk pelaku UMKM dalam mengakses modal dan pasar perlu menjadi prioritas. Peningkatan akses ke pasar regional dan nasional juga harus dilakukan melalui penguatan infrastruktur transportasi dan promosi produk lokal, sehingga masyarakat Sangasanga dapat lebih mudah memasarkan hasil pertanian dan perikananannya.

Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama pada kawasan pesisir dan

sungai. Kontaminasi air akibat limbah domestik dan industri merupakan salah satu masalah besar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

Untuk menghadapi masalah ini dalam lima tahun ke depan, pemerintah kecamatan akan melakukan rehabilitasi lahan kritis khususnya pada lahan bekas tambang. Hal ini diupayakan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis dan pihak lain termasuk peran masyarakat dan swasta. Program edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan juga akan ditingkatkan, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku industri dan usaha. Selain itu, kecamatan dapat memanfaatkan peluang kerja sama dengan IKN Nusantara untuk implementasi teknologi ramah lingkungan.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam menghadapi tantangan pengembangan kewilayahan tentunya tata kelola pemerintahan perlu untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta koordinasi yang efektif untuk mengatasi isu seperti ketenteraman masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan kualitas pembangunan lingkungan, sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Pemerintahan Kecamatan Sangasanga pada saat ini masih mengalami kendala dalam hal pelayanan publik, karena jumlah Sumber Daya Manusia dan kompetensi yang ada belum terpenuhi, sehingga perlu penyediaan sumber daya manusia yang *smart* dan profesional, dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur kecamatan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pelatihan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sarana prasarana pendukung demi lancarnya pelayanan yang diberikan agar tercapainya pemerintahan akuntabel dan berorientasi.

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti kompleksitas di mana implementasi tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan banyak aspek dan memerlukan intervensi yang kompleks, selanjutnya perlu adanya komitmen dan sinergi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan

bersama serta Setiap daerah memiliki permasalahan pemerintahan yang berbeda, sehingga implementasi tata kelola harus disesuaikan dengan konteks lokal.

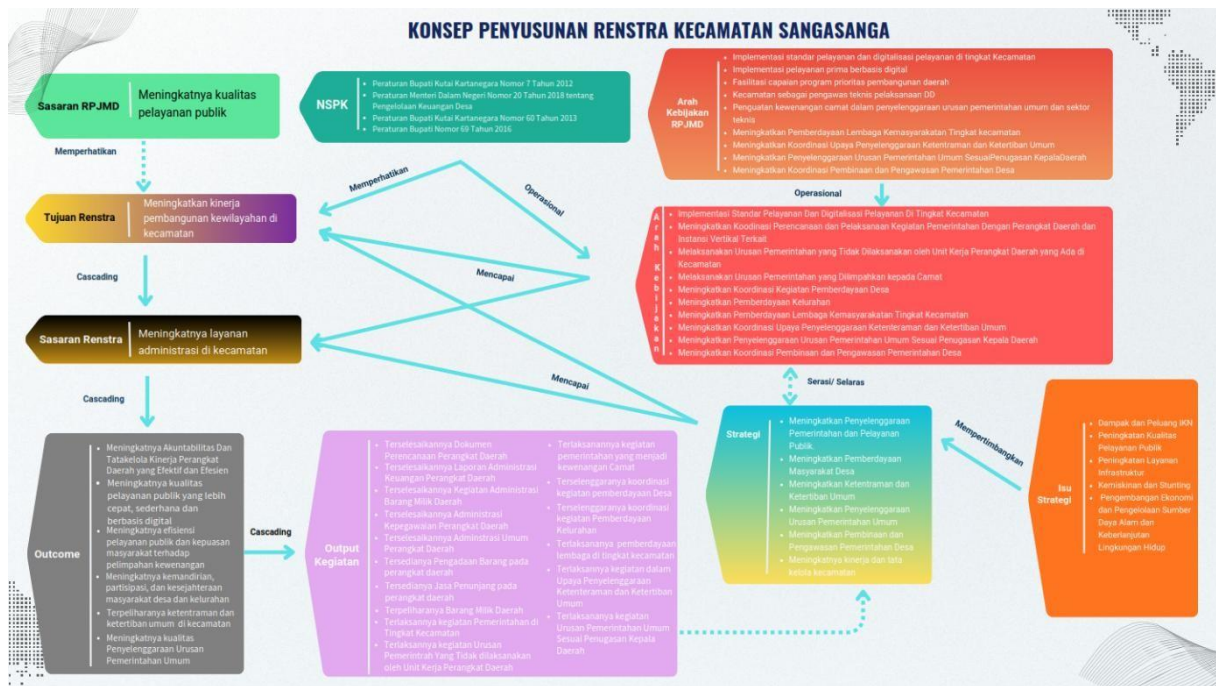
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Sangasanga dilakukan dengan konsep seperti gambar berikut:

Gambar 3.1

Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sangasanga Tahun 2025-2029

a. Tujuan Renstra Kecamatan Sangasanga

Tujuan Renstra Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Kecamatan Sangasanga menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangasanga, yaitu memberikan

pelayanan yang prima di wilayah kecamatan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu “Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.” Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan Renstra Kecamatan Sangasanga mendukung sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang berada pada tujuan 2 RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing.

b. Sasaran Renstra Kecamatan Sangasanga

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun sasaran strategis Kecamatan Sangasanga adalah:

“Meningkatnya layanan administrasi
di Kecamatan”.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ sub kegiatan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	n. a	4,57	4,6	4,63	4,65	4,67	4,7	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Kecamatan berdasarkan: • Aspek Kebijakan Pelayanan, • Aspek Profesionalisme SDM, • Aspek Sarana Prasarana, • Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, • Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta • Aspek Inovasi.
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang tertib		Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	Cara Hitung: <u>Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP</u> Total Jumlah Pelayanan dikali 100
			Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan	n. a	n. a	65	70	75	80	85	Aspek Indikator Penilaian Bobot Kualitas Pelayanan 1. Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi (KTP, KK, dll.) 35% 2. Pengelolaan Keuangan. Laporan keuangan tepat waktu dan transparansi anggaran 15% 3. Partisipasi Masyarakat: Jumlah partisipasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ sub kegiatan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											masyarakat dalam musyawarah kelurahan 15% 4. Inovasi Pembangunan: Program pengentasan kemiskinan atau pengelolaan sampah 10% 5. Kualitas Aparatur: Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur kelurahan 10% 6. Pengelolaan Lingkungan: Keberhasilan dalam program penghijauan atau kebersihan 15%

3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Sangasanga Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang konferhensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sangasanga yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Tabel 3.2
Strategi Renstra Kecamatan Kecamatan Sangasanga
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, regional, dan kabupaten, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu,

strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Sangasanga sangat penting untuk menunjukkan di mana sub kegiatan akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Secara geografis, beberapa kecamatan di Kutai Kartanegara seperti Sangasanga dan Sangasanga Barat telah diposisikan sebagai daerah mitra utama IKN. Kedua wilayah ini memiliki keunggulan strategis karena kedekatannya dengan kawasan inti IKN sekaligus akses langsung ke jalur konektivitas menuju Balikpapan dan Samarinda.

Arah kebijakan pembangunan di kawasan ini menitikberatkan pada pembentukan pusat layanan publik, pengembangan kawasan permukiman terintegrasi, serta peningkatan peran sebagai hub logistik dan transportasi. Selain itu, Sangasanga dan Sangasanga Barat juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi hijau, pariwisata, dan hilirisasi pertanian, sehingga mampu berperan ganda: mendukung kebutuhan langsung IKN sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Dengan demikian, peran Kutai Kartanegara sebagai daerah transisi IKN tidak hanya sebatas penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai mitra pembangunan strategis yang memastikan keberlanjutan ekosistem ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penetapan Sangasanga dan Sangasanga Barat sebagai bagian dari kawasan mitra IKN menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan pembangunan daerah dengan agenda nasional, sehingga Kutai Kartanegara dapat mengambil manfaat maksimal dari keberadaan IKN, baik dalam bentuk peningkatan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, maupun diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Daerah Transisi IKN ditetapkan sebagai zona transisi Ibu Kota Negara (IKN) dengan fungsi sebagai penyangga strategis.

- Peningkatan infrastruktur dasar dan transportasi.
- Penataan ruang permukiman yang adaptif terhadap kebutuhan IKN.
- Pengembangan kawasan strategis sebagai daerah penopang pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan di kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sangasanga. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Sangasanga
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahap	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
1	2	3	4	5
2026	2027	2028	2029	2030
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah serta penguatan kelembagaan pelaku usaha berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan pemanfaatan potensi lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan transformasi produk unggulan berbasis ekonomi hijau sebagai upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan daerah	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Pengembangan aksesibilitas wilayah dan fasilitas publik berwawasan lingkungan untuk mendukung pemerataan pembangunan.	Pengembangan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Perwujudan sistem infrastruktur aksesibilitas dan mobilitas yang modern, dan terhubung	Penerapan Integrasi jaringan infrastruktur antarwilayah yang menunjang konektivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah
Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat	Penerapan Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan energi terbarukan dan akselerasi pengurangan emisi karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan

Sumber: hasil analisis, 2025

3.3 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sangasanga Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Sangasanga sebagai berikut:

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan Yang Prima	Digitalisasi layanan publik	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan	Penguatan sistem pengaduan	Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3	Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa dan Kelurahan	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Menyesuaikan Dengan Pelimpahan Urusan Dari Bupati
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Desa
6			Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Kelurahan

7			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
8			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	
9			Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
10			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
11			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kecamatan Sangasanga ditentukanlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Sangasanga adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum serta memberikan pelayanan administrasi dan kebutuhan dasar kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan local yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan maupun stakeholder melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat kecamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam rangka menjamin kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif melalui upaya koordinatif lintas sektor serta pelibatan aktif aparat dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh camat sebagai perpanjangan tangan bupati/wali kota dalam mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, mencakup pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta penanganan konflik sosial dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel sebagai berikut: :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					34.250.792.885,00		38.446.108.004,97		40.085.800.017,70		43.578.505.861,55		46.350.070.224,88	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.875.696.885,00		15.617.412.004,97		15.634.104.017,70		15.633.809.861,55		15.653.374.224,88	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Sangasanga)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	62,67	62,67	63	12.875.696.885,00	64	15.617.412.004,97	66	15.634.104.017,70	68	15.633.809.861,55	70	15.653.374.224,88	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					9.588.696.000,00		6.853.576.000,00		8.476.576.000,00		11.969.576.000,00		14.721.576.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Sangasanga)	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	100	100	100	550.000.000,00	100	1.470.000.000,00	100	1.470.000.000,00	100	1.470.000.000,00	100	1.470.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Sangasanga)	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Nilai)		7,8	8,0	9.038.696.000,00	8,2	5.383.576.000,00	8,4	7.006.576.000,00	8,6	10.499.576.000,00	9,0	13.251.576.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.756.400.000,00		15.059.120.000,00		15.059.120.000,00		15.059.120.000,00		15.059.120.000,00	
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Sangasanga)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (%)	100	100	100	10.756.400.000,00	100	15.059.120.000,00	100	15.059.120.000,00	100	15.059.120.000,00	100	15.059.120.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					175.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00	
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Sangasanga)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	175.000.000,00	100	611.000.000,00	100	611.000.000,00	100	611.000.000,00	100	611.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					855.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Sangasanga)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	855.000.000,00	100	305.000.000,00	100	305.000.000,00	100	305.000.000,00	100	305.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					34250792885.00		38446108004.97		40085800017.70		43578505861.55		46350070224.88	

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sangasanga adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
15. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
16. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sangasanga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sangasanga serta tersebut dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sangasanga



Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sangasanga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 17 Tahun 2018 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		
		Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan			Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP		
					Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan		
			Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	oordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub. Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
No.7 tahun 2023 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 12. Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 10 Tahun 2025 Tanggal 23 Desember 2025 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokum	Sub. Kegiatan
SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub. Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub. Kegiatan
				Terselesainya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub. Kegiatan
				Terselesaikan-nya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub. Kegiatan
				Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub. Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub. Kegiatan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub. Kegiatan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub. Kegiatan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program
			Meningkatnya efisiensi pelayanan publik & kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan		Program
				Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang dilaksanakan secara efektif		
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub. Kegiatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub. Kegiatan
				Terlaksannya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub. Kegiatan
				Terlaksannnya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumla kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub. Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub. Kegiatan
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub. Kegiatan
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sub. Kegiatan
			Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program
				Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec.	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub. Kegiatan
			Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusn Pemerintahn Umum		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program
				Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasn Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub. Kegiatan
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub. Kegiatan

Sumber: Kecamatan Sangasanga, 2025

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01 - KECAMATAN					34.240.79 2.885,00		38.446.10 8.004,97		40.085.80 0.017,70		43.578.50 5.861,55		46.350.07 0.224,88			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.865.69 6.885,00		15.617.41 2.004,97		15.634.10 4.017,70		15.633.80 9.861,55		15.653.37 4.224,88			
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Sangasanga)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	62,67	62,67	63	12.865.69 6.885,00	64	15.617.41 2.004,97	66	15.634.10 4.017,70	68	15.633.80 9.861,55	70	15.653.37 4.224,88	7.01.1.03.0.00.17.0000 - Kecamatan Sanga Sanga		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					330.000.0 00,00		270.000.0 00,00		270.000.0 00,00		270.000.0 00,00		290.000.0 00,00			
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	12	330.000.0 00,00	14	270.000.0 00,00	14	270.000.0 00,00	14	270.000.0 00,00	14	290.000.0 00,00			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	2		2		2		2		3				
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		2	2		2		2		2		2				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		50.000.00 0,00		Sanga Sanga	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	2	30.000.00 0,00	2	30.000.00 0,00	2	30.000.00 0,00	2	30.000.00 0,00	3	50.000.00 0,00			
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0	0,00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00			
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	0	0,00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					30.000.00 0,00		55.000.00 0,00		55.000.00 0,00		55.000.00 0,00		55.000.00 0,00			Sanga Sanga	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	12	30.000.00 0,00	14	55.000.00 0,00	14	55.000.00 0,00	14	55.000.00 0,00	14	55.000.00 0,00				
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00			Sanga Sanga	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		2	2	20.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00				
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					250.000.0 00,00		150.000.0 00,00		150.000.0 00,00		150.000.0 00,00		150.000.0 00,00			Sanga Sanga	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		2	2	250.000.0 00,00	2	150.000.0 00,00	2	150.000.0 00,00	2	150.000.0 00,00	2	150.000.0 00,00				
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.718.74 4.125,00		10.648.16 4.125,00		10.648.16 4.125,00		10.648.16 4.125,00		10.648.16 4.125,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	708	977	1.540	10.718.74 4.125,00	1.540	10.648.16 4.125,00	1.540	10.648.16 4.125,00	1.540	10.648.16 4.125,00	1.540	10.648.16 4.125,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.265.68 4.125,00		10.265.68 4.125,00		10.265.68 4.125,00		10.265.68 4.125,00		10.265.68 4.125,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	708	977	1.540	10.265.68 4.125,00	1.540	10.265.68 4.125,00	1.540	10.265.68 4.125,00	1.540	10.265.68 4.125,00	1.540	10.265.68 4.125,00			
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					25.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	25.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00			
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					428.060.0 00,00		372.480.0 00,00		372.480.0 00,00		372.480.0 00,00		372.480.0 00,00		Sanga Sanga	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12	428.060.000,00	12	372.480.000,00	12	372.480.000,00	12	372.480.000,00	12	372.480.000,00			
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00			
Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		6	6	100.000.000,00	6	90.000.000,00	6	90.000.000,00	6	90.000.000,00	6	90.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					25.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan					25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		Sanga Sanga	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Barang Milik Daerah pada SKPD																	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		6	6	25.000.00 0,00	6	30.000.00 0,00	6	30.000.00 0,00	6	30.000.00 0,00	6	30.000.00 0,00				
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.00 0,00		132.500.00 00,00		132.500.00 00,00		132.500.00 00,00		132.500.00 00,00				
Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		66	50.000.00 0,00		132.500.00 00,00		132.500.00 00,00		132.500.00 00,00		132.500.00 00,00				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)					1		1		1		1					
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)					5		5		5		5					
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		82.500.00 0,00		82.500.00 0,00		82.500.00 0,00		82.500.00 0,00			Sanga Sanga	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				0,00	1	82.500.00 0,00	1	82.500.00 0,00	1	82.500.00 0,00	1	82.500.00 0,00				
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00			Sanga Sanga	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)				0,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00				
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi					50.000.00 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Sanga Sanga	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Peraturan Perundang-Undangan																
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		66	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					612.000.000,00		966.400.000,00		991.400.000,00		991.400.000,00		991.400.000,00			
Terselesainya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			1	612.000.000,00		966.400.000,00	1	991.400.000,00	1	991.400.000,00	1	991.400.000,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	427	406	292		347		347		347		347				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi					7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		Sanga Sanga	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					65.000.000,00		296.900.000,00		296.900.000,00		296.900.000,00		296.900.000,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	65.000.000,00	1	296.900.000,00	1	296.900.000,00	1	296.900.000,00	1	296.900.000,00			
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					25.000.000,00		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			1	25.000.000,00		0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					225.000.000,00		292.500.000,00		292.500.000,00		292.500.000,00		292.500.000,00		Sanga Sanga	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	427	406	292	225.000.000,00	347	292.500.000,00	347	292.500.000,00	347	292.500.000,00	347	292.500.000,00			
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00			
Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	87	46		0,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)					2		2		2		2				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)					1										
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	87	46		0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00			
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		800.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				0,00	2	800.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				0,00	1	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					965.712.760,00		1.611.145.520,97		1.611.145.520,70		1.611.145.520,55		1.611.145.520,88			
Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	965.712.760,00	12	1.611.145.520,97	12	1.611.145.520,70	12	1.611.145.520,55	12	1.611.145.520,88			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					317.780.000,00		317.780.000,00		317.780.000,00		317.780.000,00		317.780.000,00		Sanga Sanga	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	317.780.000,00	12	317.780.000,00	12	317.780.000,00	12	317.780.000,00	12	317.780.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) yang Disediakan (Laporan)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					645.432.760,00		1.290.865.520,97		1.290.865.520,70		1.290.865.520,55		1.290.865.520,88		Sanga Sanga	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	645.432.760,00	12	1.290.865.520,97	12	1.290.865.520,70	12	1.290.865.520,55	12	1.290.865.520,88			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					89.240.000,00		949.202.359,00		940.894.372,00		940.600.216,00		940.164.579,00			
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				89.240.000,00	6	949.202.359,00	6	940.894.372,00	6	940.600.216,00	6	940.164.579,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					2		2		2		2				
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas					60.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		Sanga Sanga	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01) atau Kendaraan Dinas Jabatan	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	10	10	60.000.00 0,00	10	110.000.0 00,00	10	110.000.0 00,00	10	110.000.0 00,00	10	110.000.0 00,00			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					29.240.00 0,00		39.202.35 9,00		30.894.37 2,00		30.600.21 6,00		30.164.57 9,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	10	10	29.240.00 0,00	10	39.202.35 9,00	10	30.894.37 2,00	10	30.600.21 6,00	10	30.164.57 9,00			
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00		600.000.0 00,00		600.000.0 00,00		600.000.0 00,00		600.000.0 00,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				0,00	6	600.000.0 00,00	6	600.000.0 00,00	6	600.000.0 00,00	6	600.000.0 00,00			
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		200.000.0 00,00		200.000.0 00,00		200.000.0 00,00		200.000.0 00,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				0,00	2	200.000.0 00,00	2	200.000.0 00,00	2	200.000.0 00,00	2	200.000.0 00,00			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					9.588.696. 000,00		6.853.576 .000,00		8.476.576 .000,00		11.969.57 6.000,00		14.721.57 6.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Sangasanga)	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Nilai)		7,8	8,0	9.038.696.000,00	8,2	5.383.576.000,00	8,4	7.006.576.000,00	8,6	10.499.576.000,00	9,0	13.251.576.000,00	7.01.1.03.00.17.0000 - Kecamatan Sanga Sanga		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					9.038.696.000,00		5.383.576.000,00		7.006.576.000,00		10.499.576.000,00		13.251.576.000,00			
Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	129	173	55	9.038.696.000,00	24	5.383.576.000,00	45	7.006.576.000,00	65	10.499.576.000,00	73	13.251.576.000,00			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					818.696.000,00		748.696.000,00		748.696.000,00		748.696.000,00		748.696.000,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	12	818.696.000,00	12	748.696.000,00	12	748.696.000,00	12	748.696.000,00	12	748.696.000,00			
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					8.220.000.000,00		4.634.880.000,00		6.257.880.000,00		9.750.880.000,00		12.502.880.000,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	129	173	55	8.220.000.000,00	24	4.634.880.000,00	45	6.257.880.000,00	65	9.750.880.000,00	73	12.502.880.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Sangasanga)	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	100	100	100	550.000.000,00	100	1.470.000.000,00	100	1.470.000.000,00	100	1.470.000.000,00	100	1.470.000.000,00				
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					450.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00				
Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		1	1	450.000.000,00	1	1.350.000.000,00	1	1.350.000.000,00	1	1.350.000.000,00	1	1.350.000.000,00				
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		2	3		3		3		3		3					
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			Sanga Sanga	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		2	3	200.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					250.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00			Sanga Sanga
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		1	1	250.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.050.000.000,00			
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		1	1	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00			
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			Sanga Sanga
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		1	1	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.756.40 0.000,00		15.059.12 0.000,00		15.059.12 0.000,00		15.059.12 0.000,00		15.059.12 0.000,00			
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Sangasanga)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (%)	100	100	100	10.756.40 0.000,00	100	15.059.12 0.000,00	100	15.059.12 0.000,00	100	15.059.12 0.000,00	100	15.059.12 0.000,00	7.01.1.03.00.17.0000 - Kecamatan Sanga Sanga		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00			
Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		2	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		Sanga Sanga	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		2	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.800.000. 000,00		3.800.000. .000,00		3.800.000. .000,00		3.800.000. .000,00		3.800.000. .000,00			
Terselenggaranya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	5	3.800.000. 000,00	5	3.800.000. .000,00	5	3.800.000. .000,00	5	3.800.000. .000,00	5	3.800.000. .000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5	5	5		5		5		5		5				
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		Sanga Sanga	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.250.000. 000,00		2.250.000. 000,00		2.250.000. 000,00		2.250.000. 000,00		2.250.000. 000,00		Jawa , Pandin gin , Sanga- Sanga Dalam , Sari Jaya , Sanga- Sanga Muara	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5	5	5	2.250.000. 000,00	5	2.250.000. 000,00	5	2.250.000. 000,00	5	2.250.000. 000,00	5	2.250.000. 000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		Jawa , Pendin gin , Sanga-Sanga Dalam , Sari Jaya , Sanga-Sanga Muara	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00			
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					6.906.400.000,00		11.209.120.000,00		11.209.120.000,00		11.209.120.000,00		11.209.120.000,00			
Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	207	207	207	6.906.400.000,00	207	11.209.120.000,00	207	11.209.120.000,00	207	11.209.120.000,00	207	11.209.120.000,00			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					6.906.400.000,00		11.209.120.000,00		11.209.120.000,00		11.209.120.000,00		11.209.120.000,00		Sanga Sanga	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	207	207	207	6.906.400.000,00	207	11.209.120.000,00	207	11.209.120.000,00	207	11.209.120.000,00	207	11.209.120.000,00			
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					175.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00			
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Sangasanga)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	175.000.000,00	100	611.000.000,00	100	611.000.000,00	100	611.000.000,00	100	611.000.000,00	7.01.1.03.00.17.0000 - Kecamatan Sanga Sanga		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					175.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00		611.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		2	2	175.000.000,00	1	611.000.000,00	1	611.000.000,00	1	611.000.000,00	1	611.000.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		1		1		1				
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					50.000.000,00		536.000.000,00		536.000.000,00		536.000.000,00		536.000.000,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1	50.000.000,00	1	536.000.000,00	1	536.000.000,00	1	536.000.000,00	1	536.000.000,00			
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					125.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2	2	125.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tokoh Masyarakat (Laporan)															
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					855.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00			
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Sangasanga)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	855.000.000,00	100	305.000.000,00	100	305.000.000,00	100	305.000.000,00	100	305.000.000,00	7.01.1.03.00.17.0000 - Kecamatan Sanga Sanga		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					855.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1.500	1.500	1.500	855.000.000,00	250	305.000.000,00	250	305.000.000,00	250	305.000.000,00	250	305.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					830.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		Sanga Sanga	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1.500	1.500	1.500	830.000.000,00	250	280.000.000,00	250	280.000.000,00	250	280.000.000,00	250	280.000.000,00			
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Sanga Sanga	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			

4.2 Sub Kegiatan Prioritas

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dari teknik cascading (penurunan kinerja). Dan merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.1.03.0.00.17.0000 - Kecamatan Sanga Sanga				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Sangasanga)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Sangasanga)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber : Kecamatan Sangasanga Tahun 2025

4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, terukur, dan selaras dengan mandat kewenangan serta arah kebijakan pembangunan daerah. IKU menjadi alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan mendukung realisasi tujuan jangka menengah dinas. Penetapan IKU memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, serta kontribusi langsung terhadap pelayanan publik di Kecamatan. Dengan demikian, keberadaan IKU dalam dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangasanga sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangasanga

Indikator	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IKU TUJUAN									
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	n. a	4,57	4,60	4,63	4,65	4,67	4,70	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Kecamatan berdasarkan: Aspek Kebijakan Pelayanan, • Aspek Profesionalisme SDM, • Aspek Sarana Prasarana, • Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, • Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta • Aspek Inovasi.
IKU SASARAN									
Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	<u>Cara Hitung:</u> Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi Total Jumlah Pelayanan dikali 100

Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan	Indeks	n. a	n. a	65	70	75	80	85	<p>Aspek Indikator Penilaian Bobot Kualitas Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi (KTP, KK, dll.) 35% 2. Pengelolaan Keuangan. Laporan keuangan tepat waktu dan transparansi anggaran 15% 3. Partisipasi Masyarakat: Jumlah partisipasi masyarakat dalam musyawarah kelurahan 15% 4. Inovasi Pembangunan: Program pengentasan kemiskinan atau pengelolaan sampah 10% 5. Kualitas Aparatur: Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur kelurahan 10% 6. Pengelolaan Lingkungan: Keberhasilan dalam program penghijauan atau kebersihan 15%
-----------------------------------	--------	------	------	----	----	----	----	----	--

Sumber: Kecamatan Sangasanga, 2025

BAB V

P E N U T U P

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja

1.1. Kesimpulan Penting Substantial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah Kelurahan, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

1.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif:** Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. **Efisiensi dan Efektivitas:** Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

4. Keadilan Sosial: Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi
5. Berkelanjutan: Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

1.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring Berkala: Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan: Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. Melibatkan Masyarakat: Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Rancangan Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Sangasanga. Dengan demikian, setelah Rancangan Rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Sangasanga telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas di dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Sangasanga, 23 Januari 2026

CAMAT SANGA SANGA



M. DACHRIANSYAH, S.Sos, M. Si
NIP. 19680705/198803 1 005

